

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KESEMPATAN KERJA MELALUI PENDIDIKAN

I B Km. Adi Sutrisna Manuaba¹

I Nengah Kartika²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

e-mail: adisutrisna99@gmail.com / telp: +6285 738 573 358

ABSTRAK

Wacana pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, maupun kesejahteraan masyarakat sering dikaitkan dengan pengeluaran pemerintah, investasi dan pendidikan sebagai pendorong utamanya. Tujuan penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja melalui pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2008-2013. Penelitian dilakukan di Provinsi Bali. Teknik pengumpulan data dengan pencatatan langsung berupa data mengenai data realisasi pengeluaran pemerintah, data rata-rata lama sekolah, data perkembangan penanaman modal dan data jumlah kesempatan kerja di Provinsi Bali dengan teknik analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap variabel pendidikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, Investasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang ditunjukkan dengan signifikansi $0,105 > 0,05$. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kesempatan kerja dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kesempatan kerja dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kesempatan kerja melalui pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2008-2013 dengan nilai $P_1 = 0,561$

Kata kunci: *pengeluaran pemerintah, investasi, pendidikan dan kesempatan kerja*

ABSTRACT

The research objective effect of government spending and investment on employment through education in the District / City of Bali Province 2008-2013. The study was conducted in the province of Bali.. Data collection techniques by directly recording data on the data in the form of government expenditures, the average data length of the school, the data development capital investment and data on the number of employment opportunities in the province of Bali with the technique of path analysis (path analysis). Based on the results of the analysis concludes government spending has a significant positive effect on the educational variables with significant value $0.000 < 0.05$, investments not directly affect education in the District / City in the province of Bali shown with significance $0.105 > 0.05$. Government spending and investment has a significant positive effect on the variable of employment opportunities with significant value $0.000 < 0.05$ and a significance of $0.000 < 0.05$. Education has a significant positive effect on the variable employment with a significance of $0.000 < 0.05$. Government spending and investment has a significant positive effect on the variable employment opportunities through education in the District / City of Bali Province 2008-2013 with a value of $P_1 = 0.561$

Keywords: *government spending, investment, education and employment*

PENDAHULUAN

Pulau Bali merupakan wilayah yang selama ini dikenal dengan kebudayaan serta tradisinya yang unik dan menarik, kebudayaan serta tradisi tersebut dikenal sangatlah khas dan beranekaragam, sehingga Pulau Bali memiliki daya tarik bagi masyarakat mancanegara maupun masyarakat pribumi yang terkenal sebagai salah satu daerah yang ingin berjuang untuk mengadu nasib mendapatkan pekerjaan dalam memperbaiki perekonomian keluarganya. Melihat bertambahnya jumlah angka kelulusan yang ingin mencari pekerjaan, merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Maka dari itu banyaknya jumlah kelulusan dan pendaatang yang ingin mengadu nasib di Provinsi Bali saat ini, menjadikan persaingan untuk mencari pekerjaan sangat ketat.

Fenomena yang menarik untuk dicermati khususnya di Provinsi Bali dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu (Ayu *et al.*, 2014) dan Irvan (2015) yang menyatakan setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dapat dikaitkan dengan kesempatan kerja, karena dengan terciptanya kesempatan kerja yang banyak, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.
Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali Periode 2008 – 2013

Tahun	Pertumbuhan Tingkat Pengangguran (%)	Tingkat Kelulusan Perguruan Tinggi (%)
2008	5.63	14.42
2009	5.37	14.59
2010	5.38	16.35
2011	7.91	18.06
2012	5.72	18.85
2013	5.57	23.06

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah 2014

Menurut Tabel 1. Pertumbuhan pengangguran mengalami lonjaka yang cukup besar pada tahun 2011 berbanding lurus dengan tingkat kelulusan perguruan tinggi yang juga mengalami tingkat kenaikan yang besar juga pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kelulusan perguruan tinggi meningkat, namun pertumbuhan pengangguran menurun. Fenomena stabilnya tingkat kelulusan dari perguruan tinggi berbanding terbalik dengan tidak stabilnya pertumbuhan pengangguran, ini yang menjadi alasan bagi penelitian untuk mengkaji ulang dan mengembangkan lagi penelitian dari peneliti sebelumnya.

Tingginya pengangguran yang berasal dari penduduk kelompok berpendidikan tinggi menurut Hendarmin (2012) disebabkan karena adanya kualifikasi pekerjaan yang diinginkan yang tidak sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki oleh pekerja. Kondisi ini yang akan menciptakan *mismatch* antara ketersediaan kompetensi pekerja dengan kualifikasi perusahaan yang diinginkan, sehingga banyak generasi muda Bali cenderung lebih memilih bekerja di kapal pesiar karena pendapatan di sektor ini cukup tinggi dan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang

tersedia di Provinsi Bali. Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah dan pengusaha dapat bekerja sama berusaha untuk mencari solusi dan memberikan perhatian yang lebih serius agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang layak guna mengatasi permasalahan kesempatan kerja ini.

Kesempatan kerja (*employment*) adalah kesempatan yang tercipta akibat perkembangan ekonomi tertentu, dalam arti kesempatan kerja itu mungkin saja sudah terisi atau ada yang belum terisi (Mary, 2012). Kesempatan kerja yang selama ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baik melalui sensus penduduk maupun survai penduduk baik kesempatan kerja yang dirinci menurut lapangan usaha, jenis jabatan, maupun status hubungan kerja adalah menyangkut kesempatan kerja yang telah terisi (Adi *et al.*, 2011), hal ini menyangkut pada masyarakat yang telah bekerja dan ini juga disebut pekerja (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014). Istilah *employment* dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja *to employ* yang berarti menggunakan dalam suatu proses atau usaha memberikan pekerjaan atau sumber penghidupan. Jadi *employment* berarti keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan. Penggunaan istilah *employment* sehari-hari biasa dinyatakan dengan jumlah orang dan yang dimaksudkan ialah sejumlah orang yang ada dalam pekerjaan atau mempunyai pekerjaan. Pengertian ini mempunyai dua unsur yaitu lapangan atau kesempatan kerja dan orang yang dipekerjakan atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi pengertian *employment* dalam bahasa Inggris sudah jelas yaitu kesempatan kerja yang sudah diduduki (Ayu *et al.*, 2014).

Lailan dan Sri (2011) menyatakan pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan diantara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu tertentu. Dalam menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi yaitu jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun dan belum ingin bekerja (contoh adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela), dan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang masuk angkatan kerja (yang sedang mencari pekerjaan) jumlah penduduk dalam informasi pertama dinamakan angkatan kerja dan penduduk informasi kedua dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan jumlah sedang bekerja (Hendarmin, 2012). Perbandingan diantara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (pasal1), jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.

Elvandry (2012) menyatakan kesempatan kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik mengemukakan

pandangan mereka mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*), sementara keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (*equilibrium with full employment*) hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas. Adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas tanpa campur tangan pemerintah itu merupakan syarat untuk tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh. Keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh tersebut menurut kaum klasik merupakan kondisi yang ideal atau normal dari suatu perekonomian, jika sampai terjadi pengangguran di dalam perekonomian, maka hal tersebut hanyalah gejala atau fenomena yang bersifat sementara, bahwa dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui mekanisme pasar yaitu bekerja secara bebas.

Berbeda halnya dari pandangan Keynes, kesempatan kerja menurut pandangan Keynes, berbeda dengan klasik. Menurut Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada segi permintaan, yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian pada suatu waktu tertentu, dimaksud dengan pengeluaran agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan hanya bisa diukur untuk suatu tahun tertentu.

Sayekti (2009) Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan

kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi pengeluaran pemerintah belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapatan kabupaten/kota tetap akan terjadi dan cenderung meningkat dan tidak lagi memberi ruang untuk masyarakat terutama berpenghasilan rendah ikut ambil bagian dalam proses pembangunan. Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004), yaitu suatu tindakan dari pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen (APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk nasional dan (APBD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output*, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah cenderung memiliki kekurangan dalam pembiayaannya karena anggaran APBN dan APBD yang akan diterima daerah. Belanja daerah dapat dibagi menjadi beberapa jenis belanja daerah seperti dengan belanja langsung dan tidak langsung. Adapun belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. (Mangkoesobroto, 1993:171).

Di Indonesia, Dumairy (1996:161) menyatakan pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu: Pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai; belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga

barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Stephen *et al.* (2014) menyatakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Dumairy (1999:57) menyatakan Pemerintah memiliki 4 peran yaitu : Peran Alokasi, Peran Distributif, Peran Stabilitatif, dan Peran Dinamisatif.

Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto (1993:214) menyatakan bahwa yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus

menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peran investasi swasta sudah semakin besar. Peran pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena itu peran swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar (*market failure*), dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang sudah semakin rumit (*complicated*). Pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, makin tinggi tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam suatu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya, menurut Mangkoesoebroto dalam Safina (2011).

Darma dan Susi (2011) menyatakan kekuatan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia, harus bisa mengidentifikasi sektor prioritas seperti pendidikan dan kesempatan kerja yang mempunyai potensi paling tinggi untuk meningkatkan pembangunan manusia. Pengaruh pengeluaran pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali semakin kuat atau besar, yang berarti, investasi pemerintah telah menjadi faktor pendorong peningkatan output melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Bagi individu yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada umumnya didasari harapan adanya peluang kerja dan pengembangan karier yang lebih terbuka pada masa mendatang (Matius *et al.*, 2015). Kenyataan peluang mendapatkan pekerjaan yang semakin sulit akibat kebijakan ekonomi politik negara yang belum berpihak pada terbukanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat, menjadikan tidak adanya jaminan bagi tamatan perguruan tinggi memiliki kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini berpotensi dalam memunculkan kecemasan akan kesulitan lapangan pekerjaan pada setiap individu (John *et al.*, 2013).

Yousra *et al.* (2014) menyatakan pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Didi (2013) Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga

meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja. Ilmu dan teknologi yang diberikan di lembaga pendidikan apabila dikuasai oleh lulusannya akan menjadi modal sebagai tenaga kerja produktif dan akhirnya akan meningkatkan ekonomi (Sefa *et al.*, 2015).

Fenomena susahny orang berpendidikan tinggi mendapatkan kerja di negerinya sendiri (tentu dengan gaji yang "layak") itu bukan menjadi monopoli khas Indonesia. Di Negara-negara padat penduduk seperti India, Pakistan, Iran, Mesir atau China misalnya kejadian yang sama juga mereka alami (Obi, Zita and Obi, Cyril, 2014). Betapa banyak lulusan perguruan tinggi dari negara yang disebutkan di atas terpaksa bekerja mengadu nasib di luar negeri karena di negaranya tidak ada lowongan yang memadai.

Modal manusia memiliki kontribusi langsung terhadap penciptaan kekayaan nasional. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi masyarakat. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan investasi bidang kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut, maka dari itu pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia disuatu Negara (Meier, et al, 2005).

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, Todaro (2003) membuktikan bahwa pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendidikan bukan hanya mampu meningkatkan kapabilitas saja, namun juga merupakan sarana penting dalam meningkatkan “modal manusia” di masa yang akan datang. Constantinos (2009) menyatakan peningkatan pendidikan secara umum dapat pula memperbesar produktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan (perekonomian) yang lebih tinggi baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Menurut Chon (1979) bahwa individu yang mengikuti pendidikan akan memperoleh banyak peluang untuk memperoleh pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan peningkatan pendapatan didalam kehidupannya, serta masyarakat memperoleh manfaat dari produktivitas tenaga kerja terdidik.

Pendidikan dapat dihubungkan dengan *human capital*, semakin tinggi *human capital* yang dimiliki seseorang menyebabkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa juga meningkat. *Human capital* tidak akan timbul dengan sendirinya tanpa adanya suatu proses kegiatan investasi di dalam pendidikan baik secara formal maupun nonformal. Menurut Becker (1993:29) pendidikan merupakan suatu proses kegiatan investasi yang meningkatkan keahlian (*investment in human capital*). Melalui investasi dirinya sendiri, seseorang dapat memperluas pikirannya dalam rangka memilih profesi, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menurut Hanapiyah (2010) *Human investment*

merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah “barang atau jasa” yang dihasilkan di kemudian hari dengan mengorbankan kesempatan untuk menikmati konsumsi hari ini. Sesuai prinsip investasi manusia, nilai ekonomisnya dapat berkembang di kemudian hari melalui suatu proses pertambahan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian dan keterampilan.

Wacana pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, maupun kesejahteraan masyarakat sering dikaitkan dengan investasi sebagai pendorong utamanya. Dalam proses produksi, tambahan investasi menjadi pelipatganda *output* yang membutuhkan tambahan tenaga kerja. Tambahan kebutuhan tenaga kerja ini akan memperluas kesempatan kerja serta berdampak terhadap naiknya penghasilan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat (Gatot dan Suyana, 2015). Investasi adalah penanaman modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan perlu didepresiasi (Sadono Sukirno, 2004). Kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional, maka peningkatan ini akan selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja. Pertambahan barang modal sebagai akibat dari investasi akan menambah kapasitas produksi di masa yang akan datang, perkembangan ini akan menstimulus perubahan produksi nasional dan

kesempatan kerja. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah (John and George, 2005).

Menurut Thomas (2015) investasi sangat penting karena dapat memulihkan hubungan Indonesia dengan perekonomian dunia. Selain itu, investasi juga meningkatkan output perekonomian dan dapat menghasilkan input, oleh karena adanya investasi-investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja yang berkompeten dan berkualitas (Irma *et al.*, 2015). Salah satu input yang mendorong salah satunya adalah tenaga kerja, tenaga kerja merupakan faktor pendorong penting dalam pertumbuhan perekonomian (Jamee, 1999). Melalui investasi maka akan meningkatkan kesempatan kerja. Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Investasi mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan kesempatan kerja (Jordi *et al.*, 2003).

Usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran/pembelanjaan yang berikut : (1) Pembelian

berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan, (2) Pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya, (3) Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu ia meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat investasi neto (Tambunan, 2001).

Sunindhia (Elvandry, 2012) menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja hanya dapat terlaksana dengan jalan meluaskan dasar kegiatan ekonomi, tetapi perluasan dasar ekonomi ini harus disertai dengan usaha meningkatkan produktivitas, baik di bidang kegiatan yang baru maupun dibidang tradisional. Hal ini disebabkan karena salah satu faktor yang pada umumnya menghambat produksi di negara-negara berkembang adalah produktivitas yang rendah disertai dengan kurangnya penggunaan secara penuh terhadap angkatan kerja. Menurut Simanjuntak dalam Vitalia (2014) permintaan akan tenaga kerja didasarkan atas kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Secara umum, permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah dan tingkat produksi. Semakin besar produk yang dihasilkan, maka akan semakin besar

pula pendapatan yang diterima. Tingkat pendapatan yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian berjumlah banyak.

Jumlah realisasi pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan barang publik murni yang tidak dihasilkan oleh pihak swasta seperti kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian pendidikan. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah seperti pendidikan.

Provinsi Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata dan berbagai sektor ekonomi lainnya untuk meningkatkan investasi, baik itu dari investor asing atau dalam negeri. Investor menanamkan modalnya di berbagai sektor akan sangat berpengaruh terhadap meluasnya jumlah lapangan pekerjaan dan tenaga kerja yang dibutuhkan maka dari itu secara tidak langsung permintaan tenaga kerja juga meningkat, tapi pada kenyataannya masalah yang ada adalah dimana pada penanaman modal di Provinsi Bali mengalami penurunan, akibat permasalahan penurunan

investasi maka pengeluaran pemerintah akan bertambah dan permintaan tenaga kerjanya menurun, sebaliknya jika investasi naik maka pengeluaran pemerintah akan menurun dan permintaan tenaga kerja bertambah. Di sisi lain membahas mengenai pendidikan di Provinsi Bali, jika pendidikan di Provinsi Bali rendah maka hal ini akan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya, karena kurangnya tenaga kerja terdidik yang siap terjun ke dunia kerja, yaitu berimbas pada menurunnya investasi di Provinsi Bali sehingga permintaan tenaga kerja pun ikut menurun, sebaliknya jika pendidikan tinggi maka hal ini akan menambah minat investor untuk menanamkan modalnya, karena investor percaya dengan kualitas tenaga kerja yang ada di Provinsi Bali, sehingga investasi meningkat, dan akan berimbas pada permintaan tenaga kerja yang ikut meningkat. Jumlah kesempatan kerja dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali saat ini dipengaruhi oleh naiknya upah minimum Provinsi. Penetapan kebijakan upah minimum akhir-akhir ini telah menghambat perkembangan sejumlah perusahaan, sehingga menghambat kesempatan kerja dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian diatas, sehingga untuk menyelesaikan tugas akhir akan diteliti tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pendidikan Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Investasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2008-2013”. Melalui hal ini maka akan diteliti apakah pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, karena pengeluaran pemerintah dan

tingkat investasi cenderung meningkat. Pendidikan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, karena tingkat pendidikan masyarakat dan investasi cenderung meningkat sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meluasnya kesempatan kerja.

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan pada rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan kajian-kajian teori yang relevan ataupun hasil penelitian yang sebelumnya (Sugiyono, 2013:112) maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendidikan di Provinsi Bali.
- 2) Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali.
- 3) Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali.
- 4) Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja melalui pendidikan di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif yang menggunakan 2 (dua) variabel bebas, 1 (satu) variabel intervening dan 1 (satu) variabel terikat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat

(*dependent*) yaitu kesempatan kerja, variabel bebas (*independent*) yaitu pemerintah dan investasi, dan variabel intervening yaitu pendidikan. Adapun cara yang digunakan yaitu mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian dari buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti BPS, *browsing*, dan buku-buku literatur tentang pengeluaran pemerintah, pendidikan, investasi dan kesempatan kerja tahun 2008-2013

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Teknik analisis ini digunakan dalam menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pertama dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel bebas (pengeluaran pemerintah dan investasi/ X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (pendidikan/ Y_1).

Tabel 1.
Hasil Analisis Jalur Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pendidikan

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>			
	B	Beta	T	Sig.
(Constant)	6,428		0,078	
Pengeluaran Pemerintah	1,670	0,527	4,523	0,000
Investasi	2,106	0,192	1,648	0,105
R^2	: 0,307	F Statistik	: 11,320	Sig.F : 0,000

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan laporan pada Tabel 1, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = 1,670 X_1 + 2,106 X_2$$

Melalui persamaan pada Tabel 1. Uji hipotesis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pendidikan dijelaskan bahwa pengaruh langsung dari variabel pengeluaran pemerintah (X_1) terhadap variabel pendidikan memberikan hasil sebesar 1,670 dan nilai sig 0,000 yang artinya variabel pengeluaran pemerintah (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel pendidikan dengan nilai $b_1 = 1,670$. Selanjutnya, dijelaskan bahwa pengaruh langsung variabel investasi (X_2) terhadap variabel pendidikan memberikan hasil sebesar 2,106 dan nilai sig 0,105 yang artinya variabel investasi (X_2) tidak berpengaruh terhadap variabel pendidikan dengan nilai $b_2 = 2,106$.

Langkah kedua dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel bebas (pengeluaran pemerintah dan investasi/ X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (kesempatan kerja/ Y_2).

Tabel 2.
Hasil Analisis Jalur Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja

<i>Unstandardized</i>				
<i>Coefficients</i>				
Model	B	Beta	T	Sig.
(Constant)	7,014		0,078	
Pengeluaran Pemerintah	8,784	0,409	4,044	0,000
Investasi	4,267	0,574	5,679	0,000
R ²	: 0,479	F Statistik	: 23,467	Sig.F : 0,000

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan laporan pada Tabel 2, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut:

$$Y_2 = 8,784 X_1 + 4,267 X_2$$

Melalui persamaan pada Tabel 4.4 Uji hipotesis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja dijelaskan bahwa pengaruh langsung dari variabel pengeluaran pemerintah (X_1) terhadap variabel kesempatan kerja (Y_2) memberikan hasil sebesar 8,784 dan nilai sig 0,000 yang artinya variabel pengeluaran pemerintah (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kesempatan kerja (Y_2) dengan nilai $b_1 = 8,784$. Selanjutnya, dijelaskan bahwa pengaruh langsung variabel investasi (X_2) terhadap variabel kesempatan kerja (Y_2) memberikan hasil sebesar 4,267 dan nilai sig 0,000 yang artinya variabel investasi (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kesempatan kerja dengan nilai $b_2 = 4,267$

Langkah ketiga dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel pendidikan (Y_1) terhadap variabel kesempatan kerja (Y_2).

Tabel 3.
Hasil Analisis Jalur Pengaruh Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>			
	B	Beta	T	Sig.
(Constant)	-75,973		-1,245	
Pengeluaran Pemerintah	39,973	0,589	5,261	0,000
R^2	: 0,347	F Statistik	: 27,681	Sig.F : 0,000

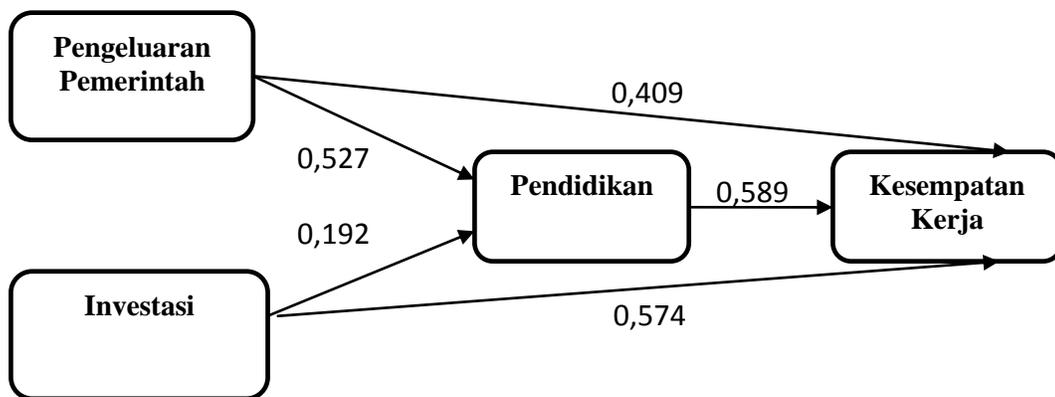
Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan laporan pada Tabel 4.5, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut:

$$Y_2 = 39,973Y_1$$

Melalui persamaan pada Tabel 4.5 Uji hipotesis pengaruh langsung pendidikan terhadap kesempatan kerja dijelaskan bahwa variabel pendidikan terhadap variabel kesempatan Kerja (Y) memberikan hasil sebesar 39,973 dan nilai sig 0,000 yang artinya variabel pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kesempatan kerja (Y) dengan nilai $b_1 = 39,973$.

Langkah terakhir dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara tidak langsung variabel pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja melalui pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



Gambar 1.
Model Diagram Jalur Akhir Pengaruh Variabel Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Investasi(X2) terhadap Kesempatan Kerja (Y2) melalui Pendidikan (Y1)

Gambar 1 digambarkan koefisien jalur pada model pengaruh *burnout* terhadap kinerja melalui dukungan sosial. Hasil analisis seperti pada Gambar 4.4 terlihat bahwa besarnya nilai $e_1 (P_{e1}) = e = \sqrt{1-0,347}, 832$ dan nilai $e_2 (P_{e2}) = e = \sqrt{1-0,479} = 0,722$ dan $e_3 (P_{e3}) = e = \sqrt{1-0,347} = 0,808$. Nilai koefisien determinasi (R^2_m) = $1-(P^2_{e1} \times P^2_{e2} \times P^3_{e3}) = 1 - (0,832^2 \times 0,722^2 \times 0,808^2) = 0,765$. Nilai tersebut berarti sebesar 76,5 persen variasi dari variabel kesempatan kerja (Y_2) dipengaruhi oleh model yang dibentuk oleh variabel pengeluaran pemerintah (X_1), Investasi (X_2) dan Pendidikan (Y_1), sedangkan sisanya yaitu sebesar 23,5 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Berdasarkan hasil dari koefisien jalur pada hipotesis penelitian, maka dapat digambarkan hubungan kausal antar variabel pengeluaran pemerintah (X_1) dan investasi (X_2), pendidikan (Y_1) terhadap kesempatan kerja (Y_2). Perhitungan pengaruh antar variabel dirangkum dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.
Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung serta Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X_1) dan Investasi (X_2), Pendidikan (Y_1) terhadap Kesempatan Kerja (Y_2)

	Pengaruh Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung M (p1 x p3)	Pengaruh Total
P1	$X_1 \rightarrow Y_1$	0,527	-	0,527
P2	$X_2 \rightarrow Y_1$	0,192	-	0,192
P3	$X_1 \rightarrow Y_2$	0,409	0,561	-0,152
P4	$X_2 \rightarrow Y_2$	0,574	0,561	0,013
P5	$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,589	-	0,589

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan uraian dari Tabel 4 dapat diketahui nilai pengaruh tidak langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja melalui Pendidikan sebesar 0,561 yang mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja melalui Pendidikan adalah sebesar 0,561 satuan. Nilai pengaruh tidak langsung Investasi terhadap Kesempatan Kerja melalui Pendidikan sebesar 0,561 mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung Investasi terhadap Kesempatan Kerja melalui Pendidikan adalah sebesar 0,561 satuan jumlah.

Nilai pengaruh tidak langsung sebesar $0,561 > 0,409$, hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, berarti variabel Pendidikan merupakan variabel intervening yang memediasi variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja, dikarenakan nilai koefisien pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah mampu mempengaruhi Kesempatan Kerja secara tidak langsung melalui Pendidikan.

Oleh karena nilai pengaruh tidak langsung sebesar $0,561 < 0,574$ hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, berarti variabel Pendidikan bukan merupakan variabel intervening yang memediasi variabel Investasi terhadap Kesempatan Kerja, dikarenakan nilai koefisien pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa Investasi tidak mampu mempengaruhi Kesempatan Kerja secara tidak langsung melalui Pendidikan.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap variabel pendidikan, hal ini menyatakan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dapat

meningkatkan kualitas penduduk dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini searah dengan pernyataan (Sukirno, 2004).dimana pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Investasi adalah motor suatu perekonomian, banyak investasi yang direalisasikan di dalam suatu negara akan menunjukkan lajunya pertumbuhan kesempatan kerja, sedangkan sedikitnya investasi yang direalisasikan akan menunjukkan lambannya laju pertumbuhan kesempatan kerja (Nworji *et al.*, 2012). Selanjutnya, dijelaskan bahwa pengaruh langsung variabel investasi tidak berpengaruh terhadap variabel pendidikan, artinya bahwa kurangnya ketersediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas perekonomian dan rendahnya investasi pada pendidikan menjadi akar masalah yang menghalangi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini searah dengan pernyataan Hendarmin (2012) Investasi dibidang pendidikan dinyatakan kurang efektif sebagai faktor produksi yang juga diperhitungkan *rate of return* (manfaatnya) dari investasi pada pendidikan. Terciptanya peluang lapangan pekerjaan yang semakin banyak akibat kebijakan ekonomi politik negara yang belum berpihak bagi rakyat menjadikan investasi dibidang pendidikan tidak terlalu penting dalam menunjang pembangunan ekonomi pada suatu Daerah (Daniel, 2006).

Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kesempatan kerja, hal ini mengandung arti untuk meningkatkan kesempatan kerja, pengeluaran pemerintah harus diarahkan pada penyediaan *overhead* sosial dan

ekonomi. Pengeluaran seperti itu menciptakan lebih banyak pekerjaan dan menaikkan efisiensi produktif perekonomian dalam jangka panjang. Kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional, maka peningkatan ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja. Hasil ini searah dengan pernyataan Hendarmin (2012) pemerintah yang stabil dan yang berusaha membantu perkembangan sektor swasta mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Hubungan investasi dengan penyerapan tenaga kerja dinyatakan oleh Wahab and Rihanat (2011) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja.

Pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kesempatan kerja, hal ini menyatakan pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang semakin penting agar generasi Indonesia bisa bersaing dalam persaingan lokal maupun Internasional dalam mendapatkan kesempatan kerja. Hasil ini searah dengan pernyataan Meylina *et al.* (2013) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas tentunya akan membentuk SDM yang berkualitas sehingga mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar. Chon (1979) membuktikan dalam penelitiannya

individu yang mengikuti pendidikan akan memperoleh banyak peluang untuk memperoleh pekerjaan, dan peningkatan pendapatan didalam kehidupannya.

Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kesempatan kerja melalui pendidikan, hal ini menyatakan pengeluaran

pemerintah atas investasi di Dunia pendidikan dapat meningkatkan kualitas penduduk dan selanjutnya akan meningkatkan kesempatan kerja. Hasil ini searah dengan pernyataan (Oloan (2009) Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui pengeluaran pemerintah dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/meningkatkan permintaan pasar (Tambunan, 2001). Gatot (2011) peningkatan pengeluaran pemerintah akan mengurangi pengangguran, tetapi bukan karena meningkatnya pegawai swasta tetapi karena meningkatnya pegawai pemerintah.

Dari pembahasan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan beberapa keterbatasan penelitian ini, sebagai berikut: 1). Lokasi penelitian ini hanya di Provinsi Bali yang terdapat di Bali dan hanya meneliti mengenai kesempatan kerja, sedangkan masih terdapat beberapa lokasi lainnya selain Bali, seperti Jakarta, Surabaya yang lebih luas daripada wilayah Bali; 2). Penelitian hanya menggunakan teknik *path* analisa, sedangkan dapat dikembangkan lagi dengan teknik analisa yang lainnya, seperti: *MRA*, *SEM analisis*, dan *AMOS*; 3). Penelitian melibatkan subyek yang terbatas, yakni 54, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subyek dengan jumlah yang lebih besar.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka simpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut: 1). Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif secara langsung terhadap pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Investasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2013; 2). Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif secara langsung terhadap kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2013; 3). Pendidikan berpengaruh positif secara langsung terhadap kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2013; 4). Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2013.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut; 1). Kepada pemerintah disarankan guna memenuhi permintaan pasar kerja, dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maka perlu pengembangan sumber daya manusia dengan membuka berbagai lembaga pendidikan formal dan non formal, sehingga peluang sumber daya manusia lebih terbuka. Dalam penyusunan anggaran pengeluaran pemerintah seyogyanya ada sinergi antara pemerintahan kab./kota dan propinsi serta pusat untuk penyusunan program-program dalam penyelenggaraan pendidikan beserta biaya yang menyertainya. Agar kebijakan

pengeluaran pemerintah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan tetapi juga dipertegas bahwa dalam pertumbuhan akan diciptakan peningkatan perluasan kesempatan kerja, mengingat masih kecilnya elastisitas kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali; 2). Melihat besarnya pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja, untuk meningkatkan peranan investasi perlu adanya koordinasi peraturan perundang-undangan sehingga tercipta investasi yang kondusif serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Bali agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Lebih jauh, item-item pembiayaan harus berbasis kinerja dan mengacu pada pemecahan masalah pendidikan yang diorientasikan pada upaya pencapaian visi dan misi institusi baik kab/kota maupun propinsi khususnya bagi masyarakat miskin, Pemerintah kab/kota maupun propinsi harus secara khusus mengalokasikan beasiswa bagi anak dari keluarga miskin. Menunjang kelancaran perencanaan, penggunaan, dan akuntabilitas dana bos yang dikeluarkan oleh kab/kota maupun propinsi, seyogyanya dana-dana operasional dan investasi tidak dialokasikan untuk membiayai komponen biaya yang sama di danai oleh pemerintah pusat melalui dana bos atau program lainnya; 3). Pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan melalui program pembangunan sarana prasarana pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan dapat terlihat setelah masyarakat yang menerima manfaat dari belanja pemerintah tersebut, seperti lulus dari sekolah dan mendapat pekerjaan atau upah yang meningkatkan taraf hidupnya. Anggaran pendidikan yang besar harus berfokus pada

kualitas pendidikan, sehingga hasil pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat pun menjadi berkualitas, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru

REFERENSI

- Widodo Adi, Waridin, dan Johanna Maria K, 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. 1(1): h:25-42
- Arief Anshory Yusuf & Andy Sumner, 2015. Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51:3, 323-348
- Ayu Putri Wahyuni I Gusti, Made Sukarsa dan Nyoman Yuliarmi, 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 3(8): h: 458-477
- Badan Pusat Statistik (BPS). Bali Dalam Angka 2014. Denpasar
- Becker, Gary S, 1993. *Human Capital: A Theoretical and Empirical analysis with Special Reference to Education*. 3rd. The University of Chicago Press. Chicago.
- Chon, Elchanan, 1997. *The Economics of Education: An Introduction*. Massachusetts: Ballinger Publishing Company
- Alexiou Constantinos, 2009. Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research*. 11(1): h: 1-16
- Daniel J. Mitchell, 2006. The Impact of Government Spending on Economic Growth. *Journal of Economic and Social Research*. pp: 1-20
- Danny Cassimon, Dennis Essers & Achmad Fauzi, 2014. Indonesia's Debtfor-Development Swaps: Past, Present, and Future, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50:1, 75-100,
- Rika Swaramarinda Darma dan Susi Indriani, 2011. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Econosains*. 9(2): h:95-105

- Setyopurwanto Didi, 2013. Pengaruh investasi sumber daya manusia dan investasi modal terhadap pendapatan perkapita masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Brawijaya*. 1(1): h:1-15
- Setio Harijono Gatot dan Suyana Utama, I Made, 2014. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi di Provinsi Bali terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Udayana*. Volume.02.N0.06.Tahun 2013
- Hendarmin, 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*. 8(3): h: 144-155
- Irma Dewi Susi S Luh, I Ketut Kirya, Fridayana Yudiaatmaja, 2015. Pengaruh investasi, tenaga kerja, dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng Periode 2008-2012. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*. 3(1): h: 1-10
- Irvan Putu, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Udayana*. Vol.5, No.3, Maret 2016 (pp.316 - 384)
- Njenga Muthui Jhon, George Kosimbei, James Maingi and Gideon Kiguru Thuku, 2013. The Impact of Public Expenditure Components on Economic Growth in Kenya 1964-2011. *International Journal of Business and Social Science*. 4(4): h: 233-25
- Loizides Jhon and George Vamvoukas, 2005. Government Expenditure and Economic Growth: Evidence From Trivariate Causality Testing. *Journal of Applied Economics*, 8(1): h: 125-152
- Gali Jordi, J.David López-Salido and Javier Valles, 2003. Understanding the Effects of Government Spending on Consumption. *International Journal of Business and Social Science*. pp: 1-40
- Safina Lailan dan Sri Endang Rahayu, 2011. Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 11(1): h:1-11

- Modupe Fasoranti Mary, 2012. The Effect of Government Expenditure on Infrastructure on the Growth of the Nigerian Economy, 1977-2009. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 2(4): h:513-518
- Irsan Kasau Matius, Rahmatiah, Madris and Sultan Suhab, 2015. Effect of Government Spending on Employment Through Investment and Its Impact on then Eastern and Western Indonesia. *International Journal of Research In Social Sciences*. 5(4): h: 55-64
- Astri Meylina, Sri Indah Nikensari, dan Harya Kuncara, 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*. 1(1): h: 77-102
- Meier M. Gerald and Rauch E. James, 2005. Leading Issues in Economic development, Eighth Edition, Oxford University Press, Toronto. *Journal of Economics*. 4(1): h:13-58
- Nworji Ifeanyi Desmond, Okwu, Andy Titus, Obiwuru Timothy C. and Nworji, Lucy Odiche, 2012. Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Negeria: A Disaggregated Time Series Analysis. *International Journal of Management Sciences and Business Research*. 1(7): h:1-15
- Obi Zita Chika and Obi Cyril Ogugua, 2014. Impact of government expenditure on education: The Nigerian experience. *International Journal of Business and Finance Management Resesarch*. 1(2): h:42-48
- Suindyah Sayekti, 2009. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekuitas*. 15(4): h: 477 – 500
- Awaworyi Churchill Sefa, Siew Ling Yew and Mehmet Ugur, 2015. Effects of Government Education and Health Expenditures on Economic Growth: A Meta-analysis. *International Journal of monash.edu/ business-economics*. 40(15): h: 1-26
- Gitahi Njuru Stephen, Charles Ombuki, Nelson Wawire and Susan Okeri, 2014. Impact Of Government Expenditure On Private Investment In Kenya. *Researchjournali's Journal of Economics*. 2(8): h:1-19

- Endang Rahayu Sri, 2011. Analisis Pengaruh Pemerintah Terhadap Perumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 11(2): h:126-138
- Lindblad Thomas, 2015. Foreign Direct Investment In Indonesia: Fifty Years Of Discourse, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51:2, 217-237
- Todaro, MP. dan Smith, SC. 2003. *Economic Development. Eighth Edition. Pearson Education Limited, United Kingdom. Haris Munandar dan Puji A.L. (Penterjemah). 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan. Penerbit Erlangga. Jakarta.*
- Wahab, A. Lawal and Rihanat. I. Abdulkadir, 2011. An analysis of Government Spending and Educational Sector and Its Contribution to GDP In Negeria. *International Journal of Financial Economics and Econometrics*. 1(4): h: 64-71
- Mekdad Yousra, Aziz Dahmani and Monir Louaj, 2014. Public spending on education and Economic Growth in Algeria:Causality Test. *International Journal of Business and Management*. 2(3): 55-70